BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan fundamental yang hingga saat ini masih menjadi fokus utama dalam diskursus pembangunan global. Dalam perspektif ekonomi pembangunan modern, kemiskinan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai kondisi multidimensional yang mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta keterlibatan dalam aktivitas sosial dan ekonomi secara bermakna (Sumargo & Simanjuntak, 2019; Salam & Pratomo, 2021).

Fenomena kemiskinan masyarakat pesisir di Provinsi Jawa Barat tidak dapat dipahami secara homogen, melainkan memiliki karakteristik yang berbeda antara wilayah pesisir utara (pantai utara/pantura) dan pesisir selatan. Kawasan pantura yang meliputi wilayah seperti Indramayu, Cirebon, dan Subang umumnya didominasi oleh aktivitas perikanan tangkap skala kecil, tambak, serta perdagangan hasil laut dengan pola distribusi yang masih bergantung pada tengkulak. Kondisi ini menciptakan relasi ekonomi yang bersifat asimetris dan memperlemah posisi tawar nelayan, sehingga berkontribusi terhadap terbentuknya kemiskinan struktural yang persisten (Kusnadi, 2002; Satria, 2015; Nikijuluw, 2001).

Hasil observasi di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa fenomena kemiskinan yang terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh faktor individual, melainkan lebih dominan dipengaruhi oleh faktor struktural. Salah satu indikasi kuat dari kondisi tersebut adalah adanya ketergantungan para pelaku usaha,

khususnya nelayan dan petani, terhadap tengkulak atau pengepul dalam proses distribusi hasil panen.

Pola hubungan ini cenderung bersifat eksploitatif, di mana harga jual hasil panen ditentukan oleh pihak pengepul sehingga posisi tawar masyarakat menjadi lemah dan berdampak pada rendahnya pendapatan yang diterima. Dalam merespons permasalahan tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menghadirkan solusi melalui program BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM). Program ini merupakan layanan keuangan mikro berbasis masjid yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mensyiarkan Gerakan Cinta Zakat.

Di sisi lain, wilayah pesisir selatan Jawa Barat seperti Pangandaran, Sukabumi, dan sebagian Garut memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari aspek geografis maupun struktur ekonomi. Pesisir selatan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia yang memiliki gelombang tinggi dan risiko cuaca ekstrem, sehingga aktivitas perikanan cenderung lebih berisiko dan tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah pantura. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas wilayah yang relatif rendah, serta minimnya diversifikasi usaha memperkuat kerentanan ekonomi masyarakat pesisir selatan (Satria, 2015; BPS, 2024; KKP, 2023).

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Perbedaan karakteristik antara pantura dan pesisir selatan tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan masyarakat pesisir di Jawa Barat bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh faktor geografis, ekologis, serta struktur ekonomi lokal. Dalam perspektif pembangunan wilayah, kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan spasial yang memerlukan pendekatan kebijakan yang berbasis wilayah (place-based approach) (Todaro & Smith, 2015; Widayatsari et al., 2025). Dengan demikian, pendekatan pengentasan kemiskinan yang bersifat seragam (*one-size-fits-all*) menjadi tidak

efektif, karena tidak mampu mengakomodasi kompleksitas permasalahan yang berbeda antarwilayah pesisir. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan integratif yang mempertimbangkan karakteristik spesifik masing-masing wilayah pesisir dalam merumuskan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Melalui skema pembiayaan mikro yang terintegrasi dengan fungsi sosial dan spiritual masjid, BMM tidak hanya berperan sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Lebih lanjut, program ini mengoptimalkan peran masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dengan mendorong kolaborasi antara lembaga keuangan zakat dan komunitas lokal. Dengan demikian, BMM diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap tengkulak, meningkatkan akses terhadap pembiayaan yang adil, serta mendorong terciptanya kemandirian ekonomi berbasis nilai-nilai keislaman.

Pendekatan multidimensional dalam mengukur kemiskinan menjadi semakin relevan karena mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan pendekatan moneter semata (Ainistikmalia & Kharisma, 2022). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dimensi-dimensi seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup memiliki kontribusi signifikan dalam menentukan tingkat kemiskinan suatu wilayah (Beribe, 2023; Kause & Fithriyah, 2024). Selain itu, kemiskinan multidimensi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural seperti pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, serta akses terhadap teknologi dan infrastruktur (Gunawan, 2025; Wulandari & Muliati, 2025).

Dalam konteks Indonesia, fenomena kemiskinan multidimensi menunjukkan variasi antarwilayah yang cukup signifikan, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih spesifik dan berbasis

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

wilayah (Widayatsari et al., 2025). Lebih lanjut, studi empiris menunjukkan bahwa rumah tangga yang mengalami kemiskinan multidimensi seringkali juga menghadapi kerentanan dalam aspek ketahanan pangan dan kualitas hidup secara keseluruhan (Ainistikmalia & Kharisma, 2022).

Hal ini menegaskan bahwa kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks dan saling terkait antar dimensi, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan (Septya et al., 2024; Lestari et al., 2024). Oleh karena itu, kemiskinan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara, karena mencerminkan sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek ekonomi tetapi juga sosial dan manusiawi (Kurniati & Hakim, 2025).

Secara global, agenda pengentasan kemiskinan telah menempati posisi strategis dalam kerangka pembangunan internasional, terutama melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menargetkan eliminasi kemiskinan dalam seluruh bentuknya di tingkat dunia (Khafidin & Firdaus, 2024; Normasyhuri & Budimansyah, 2022). Meskipun sejumlah capaian telah direalisasikan, berbagai studi empiris menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan cenderung tidak merata dan mengalami perlambatan akibat tekanan krisis global serta meningkatnya ketimpangan ekonomi (Khafidin & Firdaus, 2024). Kondisi ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan efektivitas kebijakan dalam menjangkau kelompok rentan secara menyeluruh.

Dalam perspektif teoritik, kemiskinan kerap diposisikan sebagai konsekuensi dari disfungsi dalam mekanisme distribusi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menghasilkan

pemerataan kesejahteraan, bahkan dalam beberapa kasus justru memperlebar kesenjangan sosial ekonomi apabila tidak diiringi dengan kebijakan redistributif yang efektif (Aryanto & Litriani, 2025; Saputri, 2026).

Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan dinilai tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas kemiskinan yang bersifat multidimensional. Lebih lanjut, pendekatan struktural dalam kajian kemiskinan menekankan bahwa kemiskinan merupakan manifestasi dari faktor-faktor sistemik seperti keterbatasan akses terhadap sumber daya, ketimpangan distribusi aset, serta rendahnya kapasitas kelembagaan (Alfian et al., 2025; Saputri, 2026). Dalam konteks ini, kelompok masyarakat marginal memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap kemiskinan yang bersifat kronis dan berulang.

Di sisi lain, perspektif kelembagaan menegaskan bahwa kualitas institusi memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Kelembagaan yang kuat dan terintegrasi mampu meningkatkan efektivitas distribusi sumber daya dan memperluas akses terhadap peluang ekonomi (Rodliyah et al., 2025; Alfian et al., 2025). Sebaliknya, kelembagaan yang lemah justru memperkuat hambatan struktural dalam pembangunan yang inklusif. Dalam kerangka ekonomi Islam, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai isu sosial dan moral yang membutuhkan pendekatan komprehensif. Instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki fungsi strategis sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan (Ramadhan, 2025; Syamsuri & Arief, 2024).

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Bahkan, zakat dipandang sebagai instrumen multidimensi yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan material, tetapi juga memperkuat dimensi sosial dan spiritual masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam menawarkan solusi integratif dalam pengentasan kemiskinan, yang sejalan dengan tujuan SDGs, khususnya penghapusan kemiskinan (SDG 1) (Kurnia & Widiyanti, 2024; Khafidin & Firdaus, 2024). Dengan demikian, integrasi instrumen keuangan sosial Islam menjadi alternatif strategis dalam pembangunan yang berkeadilan.

Namun demikian, implementasi sistem keuangan sosial Islam masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal integrasi dan sinergi antar instrumen yang belum optimal. Pengelolaan zakat, wakaf, dan instrumen lainnya masih cenderung berjalan secara parsial sehingga potensi dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan belum maksimal (Rodliyah et al., 2025; Saputri, 2026).

Penelitian Shabbir (2020) menunjukkan bahwa integrasi sistem keuangan sosial Islam merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas distribusi dan pemberdayaan ekonomi. Tanpa integrasi yang baik, potensi besar yang dimiliki oleh sistem ini tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, perkembangan teknologi juga membawa perubahan signifikan dalam sistem keuangan global. Integrasi teknologi finansial (*FinTech*) dalam sistem keuangan, termasuk keuangan sosial Islam, membuka peluang baru dalam meningkatkan inklusi keuangan. Namun demikian, pemanfaatan teknologi ini juga memerlukan kesiapan kelembagaan serta peningkatan literasi masyarakat.

Penelitian Muhamed (2025) menunjukkan bahwa integrasi FinTech dalam pengelolaan keuangan sosial Islam dapat meningkatkan efisiensi serta memperluas jangkauan layanan keuangan. Namun, tanpa strategi yang tepat, teknologi ini juga berpotensi menciptakan kesenjangan baru, khususnya bagi kelompok

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

masyarakat yang belum memiliki akses terhadap teknologi.

Dengan demikian, permasalahan kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Tidak cukup hanya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diperlukan sistem distribusi yang adil, kelembagaan yang kuat, serta inovasi dalam pengelolaan sumber daya.

Dalam konteks Indonesia, isu kemiskinan tetap menjadi agenda strategis yang memperoleh perhatian intensif dari pemerintah serta berbagai pemangku kepentingan pembangunan.

Tabel 1. 1 Tingkat Kemiskinan Indonesia (2014–2025)

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)
2014	11,25
2015	11,22
2016	10,86
2017	10,12
2018	9,82
2019	9,22
2020	9,78
2021	10,14
2022	9,57
2023	±9,36
2024 (Maret)	9,03
2024 (Sept)	8,57
2025 (Maret)	±8,47

Data tersebut menunjukkan pola yang cukup jelas:

1. Tren jangka panjang menurun (2014–2019)

   Tingkat kemiskinan turun dari 11,25% menjadi 9,22%, menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi dan program sosial (www.kabarbursa.com)

2. Shock pandemi (2020–2021)

   Terjadi kenaikan kembali hingga 10,14% akibat dampak COVID-19 pandemic (www.kabarbursa.com)

3. Pemulihan pasca pandemi (2022–2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Kemiskinan kembali menurun hingga sekitar 8,47% pada 2025 (www.setneg.go.id)

4. Capaian terbaru

Tahun 2024 mencatat penurunan signifikan hingga 8,57%, menjadi salah satu level terendah dalam satu dekade (www.bps.go.id)

Meskipun data statistik menunjukkan adanya tren penurunan tingkat kemiskinan nasional dalam beberapa tahun terakhir, capaian tersebut belum sepenuhnya merepresentasikan perbaikan kesejahteraan yang bersifat inklusif dan merata secara spasial.

Disparitas antarwilayah masih menjadi tantangan struktural yang signifikan dalam pembangunan di Indonesia, terutama antara kawasan perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah daratan dan kawasan pesisir.

Tabel 1. 2 Disparitas Tingkat Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia

Tahun / Periode	Perkotaan (%)	Perdesaan (%)	Kesenjangan (Selisih %)
Maret 2024	7,09	11,79	4,70
September 2024	6,66	11,34	4,68
Maret 2025	6,73	11,03	4,30

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah dari berbagai rilis Profil Kemiskinan Indonesia)

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan perkotaan dengan selisih sekitar 4–5 persen. Hal ini mengindikasikan adanya disparitas spasial yang bersifat persisten dalam struktur pembangunan di Indonesia.

Ketimpangan ini tidak hanya tercermin dalam perbedaan tingkat kesejahteraan, tetapi juga dalam distribusi akses terhadap sumber daya ekonomi, infrastruktur, dan layanan publik. Secara empiris, karakteristik kemiskinan di Indonesia menunjukkan pola

spasial yang distingtif, di mana kelompok masyarakat yang berada di wilayah tertentu memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya.

Dalam konteks tersebut, komunitas pesisir muncul sebagai salah satu segmen masyarakat yang secara konsisten berada dalam kategori rentan secara sosial ekonomi. Kerentanan ini tidak terlepas dari struktur ekonomi lokal yang didominasi oleh sektor primer, khususnya perikanan tangkap. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor ini menjadikan masyarakat pesisir sangat sensitif terhadap dinamika faktor alam, seperti variabilitas cuaca, musim, serta kondisi ekosistem laut.

Kondisi tersebut berimplikasi langsung pada pola pendapatan rumah tangga pesisir yang cenderung fluktuatif. Pada periode tertentu, hasil tangkapan dapat meningkat secara signifikan, namun pada periode lain dapat menurun drastis bahkan tidak menghasilkan pendapatan sama sekali. Fluktuasi ini menciptakan ketidakpastian ekonomi yang tinggi, yang kemudian membatasi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan. Lebih jauh, kondisi ini juga menghambat proses akumulasi aset produktif, sehingga memperkuat siklus kerentanan dan berpotensi mempertahankan kemiskinan dalam jangka panjang.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Di samping faktor ekologis, struktur ekonomi masyarakat pesisir juga dibentuk oleh relasi sosial-ekonomi yang bersifat asimetris. Dalam banyak kasus, hubungan patron-klien antara nelayan dan tengkulak membentuk ketergantungan ekonomi yang bersifat struktural. Nelayan seringkali terjebak dalam skema pembiayaan berbasis hutang yang membatasi kemandirian ekonomi mereka. Pola relasi ini tidak hanya memperlemah posisi tawar nelayan, tetapi juga mereproduksi siklus kemiskinan yang persisten dan sulit untuk diputus.

Permasalahan lain yang turut memperparah kondisi tersebut

adalah rendahnya tingkat pendidikan serta literasi keuangan di kalangan masyarakat pesisir. Keterbatasan dalam akses dan kualitas pendidikan berdampak pada rendahnya kapasitas kognitif dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan, akses informasi, serta pemanfaatan peluang ekonomi alternatif. Akibatnya, ruang mobilitas sosial-ekonomi masyarakat menjadi semakin terbatas.

Dalam perspektif inklusi keuangan, masyarakat pesisir juga menghadapi berbagai hambatan struktural dan institusional. Akses terhadap lembaga keuangan formal masih sangat terbatas, baik karena kendala geografis maupun persyaratan administratif. Ketiadaan agunan yang memadai serta rendahnya tingkat literasi keuangan menjadi faktor utama yang menghambat akses terhadap layanan perbankan. Selain itu, keterpencilan lokasi permukiman dari pusat layanan keuangan turut memperbesar biaya transaksi, sehingga semakin mengurangi tingkat keterjangkauan layanan keuangan formal bagi masyarakat pesisir.

Penelitian Ahmad (2023) menunjukkan bahwa faktor sosial dan persepsi masyarakat terhadap lembaga keuangan sangat mempengaruhi tingkat inklusi keuangan. Dalam konteks masyarakat pesisir, faktor kepercayaan dan pengalaman sebelumnya terhadap lembaga keuangan menjadi faktor penting yang menentukan apakah mereka akan menggunakan layanan tersebut atau tidak. Lebih lanjut, penelitian Marla (2023) menegaskan bahwa inklusi keuangan Islam tidak hanya dipengaruhi oleh akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga oleh literasi keuangan dan modal sosial. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan inklusi keuangan harus dilakukan secara holistik, tidak hanya melalui penyediaan layanan, tetapi juga melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kajian mengenai kebijakan publik di wilayah pesisir Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah telah mengembangkan berbagai

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

strategi intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, melalui pendekatan yang bersifat multidimensional. Secara umum, kebijakan tersebut mencakup pemberian bantuan sosial, penguatan akses pembiayaan, serta program pemberdayaan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan (Prayitno, n.d.; Ginting, 2025).

Dalam perspektif pembangunan, pemberdayaan masyarakat pesisir tidak hanya difokuskan pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta pembangunan berbasis potensi lokal (Poerwanto, 2025; Pratama & Murtasidin, 2025).

Sejumlah studi literatur menegaskan bahwa program seperti Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan berbagai inisiatif berbasis komunitas telah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti pendekatan top-down, keterbatasan akses terhadap sumber daya, dan kurangnya keberlanjutan program (Nugroho, 2015; Pariangu, 2020).

Selain itu, penguatan modal sosial dan kelembagaan lokal menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas kebijakan, termasuk dalam mendorong partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam aktivitas ekonomi pesisir (Anggraini, 2018; Kahar & Broto, 2023). Meskipun demikian, implementasi program-program tersebut masih dihadapkan pada sejumlah kendala fundamental, khususnya terkait dengan aspek keberlanjutan (*sustainability*) dan lemahnya integrasi lintas program.

Permasalahan krusial yang mengemuka adalah dominannya pendekatan sektoral dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Berbagai program cenderung diimplementasikan secara parsial tanpa

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

koordinasi yang efektif antar lembaga terkait. Kondisi ini berimplikasi pada terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) program, inefisiensi dalam alokasi sumber daya, serta rendahnya efektivitas intervensi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sasaran.

Apabila ditinjau dari perspektif kelembagaan, fenomena tersebut mencerminkan belum optimalnya kapasitas sistem dalam membangun sinergi yang terkoordinasi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Padahal, keberadaan kelembagaan yang kuat, adaptif, dan terintegrasi merupakan prasyarat utama dalam menghasilkan kebijakan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka alternatif solusi, lembaga keuangan sosial Islam memiliki potensi signifikan untuk berkontribusi dalam menjawab berbagai keterbatasan tersebut. Instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sumber pembiayaan sosial yang bersifat berkelanjutan, inklusif, serta berbasis pada pemberdayaan komunitas.

Penelitian Elzahi (2022) menunjukkan bahwa integrasi antara keuangan sosial dan inklusi keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara signifikan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian Khana (2024) menunjukkan bahwa *microfinance* berbasis syariah mampu meningkatkan inklusi keuangan serta kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis dan berbasis nilai. Model ini menekankan pada pemberdayaan masyarakat serta penguatan kapasitas ekonomi. Namun demikian, implementasi lembaga keuangan sosial Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya integrasi antar instrumen serta rendahnya kapasitas kelembagaan dalam mengelola dana secara produktif. Penelitian Fersi (2023)

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

menunjukkan bahwa efisiensi lembaga keuangan mikro Islam sangat dipengaruhi oleh tingkat integrasi antara fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Lembaga yang mampu mengintegrasikan kedua fungsi tersebut cenderung memiliki dampak yang lebih besar terhadap pengentasan kemiskinan.

Dengan demikian, permasalahan kemiskinan di masyarakat pesisir Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh faktor struktural dan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat pesisir di Provinsi Jawa Barat, sebuah paradoks mengingat potensi sumber daya kelautan yang besar di wilayah ini. Ironisnya, wilayah pesisir yang seharusnya menjadi pusat perekonomian berbasis kelautan sering kali justru menghadapi permasalahan ekonomi yang kompleks (As, 2017; Irawan et al., 2024). Dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti perikanan dan hasil laut lainnya, masyarakat pesisir menghadapi kendala seperti akses yang terbatas terhadap pasar, rendahnya keterampilan, dan minimnya infrastruktur, yang menghambat pemanfaatan potensi kelautan secara optimal. Tingginya ketergantungan pada sektor perikanan tradisional yang terpengaruh musim semakin memperparah kerentanan ekonomi masyarakat pesisir (Kusnadi, 2002; Satria, 2015).

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Kemiskinan dianggap sebagai akibat dari ketidakmampuan individu untuk berkompetisi dalam pasar bebas. Dalam pandangan ini, negara seharusnya tidak terlalu campur tangan dalam ekonomi, dan kebijakan seperti pengurangan subsidi sosial serta deregulasi pasar dianggap sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dan memitigasi kemiskinan. Menurut beberapa penelitian, kebijakan ini seringkali memperburuk ketimpangan sosial dan memperparah kemiskinan (McLean et al., 2019). Sebaliknya, menekankan perlunya intervensi

negara untuk mengatasi kemiskinan melalui redistribusi kekayaan dan jaminan sosial. Negara dianggap bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta memastikan adanya akses yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Paradigma ini berfokus pada pemerataan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang lebih miskin. Beberapa studi menunjukkan bahwa kebijakan yang mendukung pengentasan kemiskinan lebih efektif dalam mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan.an (Strier, 2019).

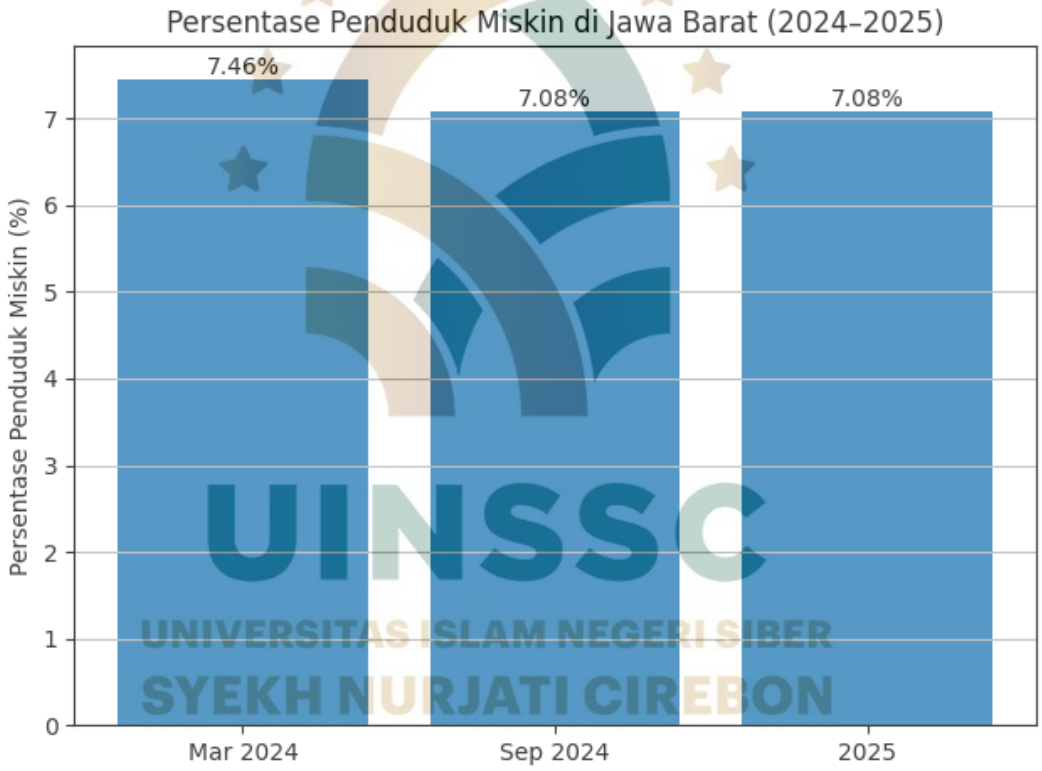
Dalam lingkup regional, Provinsi Jawa Barat menempati posisi strategis sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan basis sektor yang beragam, meliputi industri, pertanian, serta kelautan. Secara khusus, kawasan pesisir di wilayah ini memiliki garis pantai yang relatif panjang serta potensi sumber daya kelautan yang signifikan. Sejumlah kabupaten seperti Indramayu, Cirebon, Subang, dan Pangandaran dikenal memiliki intensitas aktivitas perikanan yang tinggi. Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum secara optimal berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara substantif. Kondisi tersebut merefleksikan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi wilayah dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat lokal.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Tabel 1. 3 Data Kemiskinan di Pesisir Provinsi Jawa Barat

No	*Indikator*	*Maret 2023*	*Maret 2024*	*September 2024*	*2025*	*Keterangan*
1	Persentase Penduduk Miskin (%)	-	7,46%	7,08%	7,08%	Turun 0,38 poin (2024), lebih rendah dari nasional 8,57% (2025)
2	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	-	±3,85	3,67	3,67	Turun 180,32 ribu (2024), turun 220,25 ribu dari 2023
3	Persentase Kemiskinan Perkotaan (%)	-	7,07%	6,65%	-	Mengalami penurunan
4	Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan	-	-	-	-	Turun 141,06 ribu orang

No	*Indikator*	*Maret 2023*	*Maret 2024*	*September 2024*	*2025*	*Keterangan*
5	Persentase Kemiskinan Perdesaan (%)	-	9,07%	8,85%	-	Mengalami penurunan
6	Jumlah Penduduk Miskin Perdesaan	-	-	-	-	Turun 39,26 ribu orang
7	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	-	-	Rp535.509	-	Standar kebutuhan minimum
8	Garis Kemiskinan Makanan	-	-	Rp400.115 (74,72%)	-	Komponen terbesar
9	Garis Kemiskinan Non-Makanan	-	-	Rp135.394 (25,28%)	-	Komponen pelengkap



Grafik 1. 1 Data Kesmiskinan Pesisir Provinsi Jawa Barat

Pada September 2024, persentase penduduk miskin di Jawa Barat tercatat sebesar 7,08 persen, mengalami penurunan sebesar 0,38 persen poin dibandingkan Maret 2024 dan turun 0,54 persen poin dibandingkan Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada periode tersebut mencapai 3,67 juta orang, berkurang sebanyak 180,32 ribu orang dibandingkan Maret 2024, dan turun 220,25 ribu orang dibandingkan Maret 2023. Di tingkat perkotaan, persentase penduduk

miskin menurun dari 7,07 persen pada Maret 2024 menjadi 6,65 persen pada September 2024, dengan jumlah penduduk miskin perkotaan berkurang sebanyak 141,06 ribu orang. Di perdesaan, persentase kemiskinan turun dari 9,07 persen pada Maret 2024 menjadi 8,85 persen pada September 2024, dengan jumlah penduduk miskin perdesaan berkurang sebanyak 39,26 ribu orang. Garis Kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp535.509 per kapita per bulan, dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp400.115 (74,72 persen) dan Garis Kemiskinan Non Makanan sebesar Rp135.394 (25,28 persen) (www.bps.go.id)

Data kemiskinan di Jawa Barat pada tahun 2025 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin adalah 7,08%, angka ini lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 8,57%. Akan tetapi, karena Jawa Barat memiliki populasi yang besar, jumlah penduduk miskin secara absolut tetap tinggi, yaitu sekitar 3,67 juta orang (www.bps.go.id). Masyarakat pesisir sering kali tidak memiliki akses yang memadai ke pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas. Minimnya pelatihan dan pengembangan keterampilan mempersempit peluang kerja yang layak di luar sektor kelautan, sehingga memperparah ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas. Faktor-faktor ini membentuk lingkaran kemiskinan yang sulit dipecahkan tanpa intervensi yang terencana dan berkelanjutan (Mulyadi, 2017; Rizal, 2013).

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Di sisi lain, faktor kegagalan pengentasan kemiskinan di Jawa Barat dipengaruhi oleh berbagai masalah struktural dan sosial yang kompleks. Salah satunya adalah ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan, di mana daerah perdesaan masih terbatas aksesnya terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Infrastruktur yang kurang berkembang di beberapa daerah juga membatasi potensi ekonomi lokal. Selain itu, kurangnya pemberdayaan masyarakat, terutama

dalam keterampilan dan kewirausahaan, membuat mereka sulit untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Pengaruh bencana alam, seperti banjir dan kekeringan, yang sering melanda beberapa daerah di Jawa Barat juga memperburuk kondisi masyarakat miskin, menghambat produktivitas, dan memperlambat proses pemulihan ekonomi. Ditambah dengan kesulitan dalam mencapai kesejahteraan secara merata, program-program yang ada sering kali tidak sepenuhnya tepat sasaran, serta ketergantungan pada bantuan sosial jangka pendek yang tidak memberikan solusi jangka panjang (Mulyadi, 2017).

Dalam perspektif pembangunan wilayah (*regional development*), fenomena ini mengindikasikan adanya inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya serta belum efektifnya mekanisme distribusi ekonomi. Hal ini semakin diperkuat oleh dominannya aktivitas ekonomi tradisional yang dijalankan masyarakat pesisir, yang umumnya memiliki tingkat produktivitas dan nilai tambah yang relatif rendah. Berdasarkan berbagai temuan empiris, masyarakat pesisir di Jawa Barat menghadapi persoalan yang bersifat multidimensional dan saling berkaitan satu sama lain. Studi menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap permodalan menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan kapasitas ekonomi nelayan, terutama bagi nelayan skala kecil yang tidak memiliki jaminan untuk mengakses lembaga keuangan formal (Royandi, 2019; Nikijuluw, 2001). Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan turut membatasi kemampuan masyarakat dalam mengadopsi inovasi serta mengembangkan usaha produktif di luar sektor perikanan tangkap (Hewindati, 2018; Hartati et al., 2021).

Dalam konteks ekonomi, minimnya diversifikasi kegiatan usaha menyebabkan ketergantungan tinggi terhadap hasil tangkapan laut yang bersifat musiman dan rentan terhadap perubahan lingkungan maupun pasar (Febrianti, 2016; Prihandoko et al., 2012). Di sisi lain, lemahnya kapasitas kelembagaan ekonomi lokal, seperti koperasi

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

nelayan atau kelompok usaha bersama, juga menjadi faktor yang menghambat penguatan posisi tawar masyarakat pesisir dalam rantai nilai ekonomi (Aziz et al., n.d.; Suryana & Lail, 2025).

Konstelasi permasalahan ini secara kumulatif menghambat kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan. Di samping itu, struktur ekonomi masyarakat pesisir cenderung bersifat subsisten di mana pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Implikasi dari kondisi ini adalah rendahnya tingkat tabungan serta terbatasnya kemampuan untuk melakukan akumulasi modal dan investasi produktif. Dalam jangka panjang, situasi ini berkontribusi pada reproduksi siklus kemiskinan yang bersifat intergenerasional. Aspek lain yang turut memperburuk kondisi tersebut adalah keterbatasan akses terhadap teknologi dan informasi.

Dalam era ekonomi digital, penguasaan teknologi menjadi determinan penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi. Namun demikian, masyarakat pesisir masih menghadapi hambatan signifikan, baik dalam hal ketersediaan infrastruktur digital maupun tingkat literasi teknologi, sehingga menghambat integrasi mereka ke dalam sistem ekonomi yang lebih modern. Dari sisi akses keuangan, keterbatasan terhadap layanan lembaga keuangan formal masih menjadi kendala struktural yang dominan. Sebagian besar masyarakat pesisir belum terinklusi dalam sistem perbankan maupun lembaga keuangan resmi lainnya, sehingga akses terhadap pembiayaan produktif menjadi sangat terbatas. Kondisi ini pada akhirnya membatasi peluang pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan. Sebagai konsekuensi dari berbagai keterbatasan tersebut, masyarakat pesisir kerap bergantung pada lembaga keuangan informal, seperti tengkulak atau rentenir, sebagai sumber pembiayaan utama dalam memenuhi kebutuhan produksi maupun konsumsi sehari-hari. Ketergantungan ini muncul karena kemudahan akses,

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

fleksibilitas, serta minimnya persyaratan dibandingkan lembaga keuangan formal, meskipun seringkali disertai dengan skema yang merugikan nelayan, seperti bunga tinggi atau sistem ikatan penjualan hasil tangkapan (Syafrini, 2015; Atmadjaja, 2017).

Dalam banyak kasus, hubungan antara nelayan dan tengkulak berkembang menjadi relasi patron-klien yang bersifat struktural, di mana nelayan tidak hanya bergantung secara finansial, tetapi juga dalam aspek distribusi dan pemasaran hasil laut (Utami & Fatoni, 2025; Jihwindriyo et al., 2016). Kondisi ini memperkuat siklus ketergantungan dan membatasi kemandirian ekonomi masyarakat pesisir, sehingga sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan struktural (Rizky et al., n.d.). Mekanisme pembiayaan informal ini umumnya bersifat eksploitatif, dengan skema bunga tinggi atau pola bagi hasil yang tidak proporsional. Hal ini tidak hanya memperlemah posisi ekonomi masyarakat, tetapi juga memperdalam kerentanan finansial mereka. Oleh karena itu, pentingnya intervensi kebijakan yang mampu memperluas akses pembiayaan formal dan memperkuat kelembagaan ekonomi lokal guna mengurangi dominasi lembaga keuangan informal di wilayah pesisir.

Dalam perspektif ekonomi Islam, fenomena kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi semata, tetapi juga sebagai manifestasi dari ketidakadilan sosial serta lemahnya moralitas dalam sistem distribusi kekayaan. Realitas masih tingginya tingkat kemiskinan, khususnya di wilayah tertentu, menunjukkan bahwa prinsip keadilan distributif dan keseimbangan ekonomi dalam Islam belum terimplementasikan secara optimal.

Islam secara normatif telah menyediakan seperangkat instrumen yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, serta skema pembiayaan mikro berbasis syariah (*Islamic microfinance*). Instrumen-instrumen ini dirancang tidak hanya untuk membantu

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

kelompok masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga untuk mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi secara berkeadilan. Dalam konteks ini, redistribusi kekayaan menjadi elemen penting guna memastikan terciptanya kesejahteraan yang merata di masyarakat.

Lebih lanjut, teori ekonomi Islam menekankan bahwa lembaga keuangan tidak hanya berfungsi sebagai intermediary finansial, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Lembaga keuangan sosial Islam, seperti bank syariah dan lembaga zakat, memiliki peran strategis dalam memastikan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi serta mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi yang berbasis nilai-nilai etika dan keadilan (Yenti et al., 2021). Dengan demikian, ekonomi Islam menawarkan kerangka kerja yang holistik dalam mengatasi kemiskinan melalui integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan spiritual (Yurtseven & Bayram, 2020).

Namun demikian, beberapa kritik menyatakan bahwa pendekatan ekonomi Islam cenderung terlalu bergantung pada instrumen filantropi, seperti zakat dan sedekah, serta belum sepenuhnya menyentuh akar struktural kemiskinan yang memerlukan intervensi kebijakan ekonomi dan politik yang lebih komprehensif (Bernards, 2022). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara instrumen keuangan sosial Islam dengan kebijakan publik yang inklusif agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan menyentuh aspek struktural maupun kultural.

Penelitian oleh Rusydiana (2019) menunjukkan bahwa efisiensi sosial dan finansial lembaga keuangan Islam di Indonesia masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal distribusi dan pengelolaan dana. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun potensi besar tersedia, namun implementasinya masih belum optimal. Lebih lanjut, penelitian Berguiga (2020) menunjukkan bahwa lembaga

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

keuangan mikro Islam memiliki potensi yang lebih baik dibandingkan lembaga konvensional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama jika dikelola secara efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis syariah memiliki keunggulan dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan lembaga keuangan sosial Islam sangat bergantung pada model pengelolaan yang digunakan. Tanpa model yang tepat, potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Penelitian Musari (2023) menekankan pentingnya integrasi antar berbagai pihak dalam pengembangan sistem keuangan sosial Islam. Pendekatan *quadruple helix* yang melibatkan pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat dinilai mampu menciptakan sistem yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian Alrashedi (2023) menunjukkan bahwa pengembangan model sumber daya keuangan sosial Islam yang terintegrasi dapat menjadi solusi dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan integratif merupakan kebutuhan yang mendesak. Namun demikian, dalam konteks masyarakat pesisir di Jawa Barat, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji integrasi lembaga keuangan sosial Islam dalam pengentasan kemiskinan. Sebagian besar penelitian masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek kontekstual wilayah pesisir.

Upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat menunjukkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Barat melalui optimalisasi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). BAZNAS Jawa Barat tidak hanya menyalurkan bantuan secara konsumtif, tetapi juga mengembangkan program pemberdayaan ekonomi produktif yang berorientasi pada kemandirian mustahik. Program-program seperti

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Zakat Community Development (ZCD), Balai Ternak, Z Auto, dan Lumbung Pangan dirancang untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat miskin melalui penguatan sektor usaha mikro, pertanian, dan peternakan. Pendekatan ini sejalan dengan strategi pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan yang menekankan transformasi mustahik menjadi pelaku ekonomi mandiri (baznasjabar.org).

Inovasi program seperti Dhuafa Investor dan Pra Koperasi menunjukkan upaya integratif dalam membangun ekosistem ekonomi syariah berbasis komunitas. Program ini memberikan akses permodalan, pendampingan usaha, serta skema bagi hasil yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin ekstrem. Secara kelembagaan, kinerja BAZNAS Jawa Barat juga tercermin dalam capaian Indeks Zakat Nasional (IZN) yang tinggi, yang mengindikasikan efektivitas pengelolaan zakat dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, peran BAZNAS Jawa Barat menjadi signifikan sebagai instrumen sosial dan ekonomi dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan (baznas.go.id; baznasjabar.org).

Lembaga Keuangan Sosial Islam memainkan peran penting dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat pesisir, khususnya melalui penyediaan opsi pembiayaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Masyarakat pesisir bergantung pada sumber daya laut untuk mata pencaharian, seperti nelayan dan pembudidaya ikan. Mereka memiliki ikatan sosial yang kuat, tetapi sering menghadapi tantangan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, dan infrastruktur. Kehidupan mereka juga rentan terhadap perubahan lingkungan dan bencana alam. Dengan menawarkan akses modal yang bebas dari bunga atau menggunakan sistem berbasis syariah, lembaga-lembaga ini mendukung masyarakat dalam memulai usaha skala kecil dan menengah, meningkatkan hasil produksi, serta memperluas jaringan

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

pemasaran yang dimiliki (Ferdaus et al., 2024; Hidayat & Makhrus, 2021; Sukmayadi, 2016). Selain itu, lembaga keuangan seperti Baitul Maal wa Tamwil, zakat, dan wakaf telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam mengurangi kemiskinan melalui program-program pemberdayaan. Melalui distribusi dana zakat produktif dan pengelolaan wakaf produktif, masyarakat pesisir tidak hanya dapat diberdayakan untuk memanfaatkan potensi ekonomi mereka secara optimal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di wilayah pesisir (Pujiyono, 2010; Sukmawati et al., 2023).

Salah satu keunggulan Lembaga Keuangan Sosial Islam adalah kemampuannya menjangkau kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi, yang seringkali sulit diakses oleh lembaga keuangan konvensional. Dengan pendekatan berbasis komunitas, lembaga-lembaga ini tidak hanya memberikan dukungan finansial yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga pelatihan dan pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kemandirian ekonomi masyarakat (Diatmika & Rahayu, 2022; Hilmi, 2024). Di Jawa Barat, lembaga seperti BAZNAS, Dompet Dhuafa, dan BMT telah menginisiasi berbagai program inovatif yang mendukung transformasi ekonomi di wilayah pesisir. Program-program ini mencakup pelatihan kewirausahaan, pemberian modal usaha tanpa riba, serta pendampingan intensif bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan fokus pada pengembangan sektor-sektor unggulan di pesisir, seperti perikanan berkelanjutan dan pariwisata berbasis masyarakat, lembaga-lembaga ini berupaya menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah pesisir Jawa Barat (Marfu'ah & Shadiqin, 2022; Rohmaniyah, 2021).

Penelitian sebelumnya tentang kemiskinan di masyarakat pesisir, terutama di Jawa Barat, telah memberikan pemahaman

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

mendalam tentang tantangan yang dihadapi masyarakat pesisir dalam memanfaatkan potensi laut. Meski kaya akan sumber daya alam, mereka sering terkendala oleh infrastruktur yang kurang, keterampilan rendah, dan akses pasar terbatas untuk mengoptimalkan hasil laut. Selain itu, masyarakat pesisir sangat bergantung pada perikanan tradisional yang dipengaruhi musim, sehingga rentan terhadap perubahan ekonomi dan iklim. Kondisi ini diperburuk oleh eksploitasi sumber daya laut yang tidak berkelanjutan, yang mengancam mata pencaharian mereka dalam jangka panjang (Tan, Nesti, Yonnedi, et al., 2021).

Selain itu, pentingnya kebijakan pemerataan ekonomi dan intervensi negara untuk mengurangi kemiskinan. Paradigma ini berfokus pada pengurangan kesenjangan sosial dengan redistribusi kekayaan dan pemberian akses yang adil terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (Hababil et al., 2024). Pendekatan berbasis ekonomi Islam, khususnya melalui Lembaga Keuangan Sosial, menawarkan potensi yang signifikan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, namun masih menghadapi tantangan dalam implementasinya, seperti birokrasi yang rumit dan potensi penyalahgunaan dana (Shah & Shireen, 2025).

Meskipun prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti zakat, infaq, dan sedekah telah diakui sebagai instrumen yang efektif untuk meredistribusi kekayaan dan mengurangi ketimpangan sosial, belum ada kajian yang mendalam mengenai peran Lembaga Keuangan Sosial dalam konteks ini. Lembaga Keuangan Sosial, dengan prinsip keadilan ekonomi dan tanpa bunga, memiliki kemampuan untuk memberikan pembiayaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat pesisir, serta dapat mendukung pengembangan usaha kecil yang berbasis pada potensi lokal (Malhotra & Saravanan, 2025). Dalam hal ini, Lembaga Keuangan Sosial dapat menjadi alternatif yang lebih adil dan efektif

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

dibandingkan dengan pembiayaan konvensional, membuka peluang bagi masyarakat pesisir untuk mengakses modal usaha, mengurangi ketergantungan pada sektor perikanan tradisional, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka secara berkelanjutan (Hamedani & Aslam, 2025).

Kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam studi ini menjadi landasan penting yang menunjukkan urgensi dilakukannya penelitian lebih lanjut. Sejumlah penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Tan et al. (2021), telah mengkaji kemiskinan masyarakat pesisir dari aspek keterbatasan infrastruktur, rendahnya keterampilan, serta keterbatasan akses pasar. Sementara itu, Hababil et al. (2024) lebih menekankan pada pentingnya intervensi kebijakan negara dalam mengurangi kesenjangan sosial melalui pendekatan redistribusi ekonomi. Di sisi lain, Shah dan Shireen (2025) mengidentifikasi potensi lembaga keuangan sosial berbasis ekonomi Islam, meskipun masih menghadapi berbagai kendala implementatif.

Namun demikian, dari berbagai studi tersebut, sebagian besar masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji model pemberdayaan ekonomi berbasis lembaga keuangan sosial yang kontekstual pada masyarakat pesisir di Jawa Barat. Penelitian oleh Malhotra dan Saravanan (2025), serta Hamedani dan Aslam (2025), misalnya, lebih banyak membahas kerangka konseptual dan potensi lembaga keuangan sosial secara umum, tanpa mengelaborasi implementasi empiris pada komunitas pesisir dengan karakteristik sosial-ekonomi yang spesifik.

Dengan demikian, belum ditemukan model konkret yang secara spesifik diterapkan pada masyarakat pesisir di Jawa Barat, padahal karakteristik wilayah pesisir memiliki kompleksitas tersendiri yang berbeda dengan wilayah non-pesisir, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan pendekatan yang lebih kontekstual, berbasis realitas lokal, serta

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

terintegrasi antara aspek ekonomi, kelembagaan, dan sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir.

Secara teoritis, konsep integrasi keuangan sosial Islam telah banyak dibahas dalam literatur. Sejumlah penelitian seperti yang dilakukan oleh Zulkipli, Basit, dan Wajdi (2025) menunjukkan pentingnya integrasi zakat dan wakaf dalam mendukung pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Selain itu, Alfian, Nurzaman, dan Alfian (2025) mengembangkan model integrasi zakat dan wakaf untuk pemberdayaan UMKM, sementara Maulida, Ubaidillah, dan Rosyidah (2026) menekankan sinergi zakat dan wakaf dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Kajian lain oleh Rufaedah dan Patih (2025) serta Munthe (2025) juga menegaskan bahwa *Islamic social finance* memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan, namun masih menghadapi tantangan integrasi antar-instrumen.

Meskipun demikian, sebagian besar studi tersebut masih bersifat umum dan belum banyak diuji secara kontekstual pada komunitas pesisir. Penelitian yang lebih spesifik seperti yang dilakukan oleh Nurmatias, Akbar, dan Firdaus (2025) serta Mongkito et al. (2025) mulai mengarah pada integrasi wakaf produktif dalam pengembangan ekonomi pesisir, namun masih terbatas pada aspek sektoral (misalnya wakaf atau *blue economy*) dan belum membangun model integratif yang komprehensif berbasis kebutuhan masyarakat pesisir. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk mengembangkan model teoritis yang lebih aplikatif dan kontekstual.

Selanjutnya, secara praktis, berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan selama ini cenderung bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistematis. Temuan Bakari, Ahmad, dan Salleh (2019) menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZISWAF masih berjalan terpisah antar lembaga, sehingga efektivitasnya belum optimal. Demikian pula, Hidayat, Akbar, dan Ardiansyah (2024) menegaskan bahwa integrasi antara keuangan sosial Islam dan sistem

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

keuangan syariah masih belum berjalan secara maksimal dalam mendukung inklusi ekonomi. Kondisi ini menyebabkan program-program yang ada belum mampu menjawab permasalahan kemiskinan secara menyeluruh.

Adapun dari sisi kebijakan, hingga saat ini belum terdapat formulasi kebijakan yang secara khusus mengintegrasikan lembaga keuangan sosial Islam dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir. Beberapa kajian seperti Irsyadillah, Bahri, dan Anwar (2025) serta Zainudin dan Nuryadi (2026) menyoroti pentingnya integrasi *Islamic social finance* dengan agenda pembangunan (misalnya SDGs), namun belum secara spesifik diarahkan pada kebijakan berbasis wilayah pesisir. Ketiadaan kebijakan yang terarah ini semakin memperkuat pentingnya penelitian yang mampu memberikan kontribusi dalam merumuskan model integratif yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga implementatif dan berbasis kebutuhan masyarakat pesisir.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa permasalahan utama dalam pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir di Jawa Barat bukan hanya terletak pada keterbatasan sumber daya, tetapi juga pada ketiadaan model integratif yang efektif, kontekstual, dan berkelanjutan. Kondisi ini menjadi landasan kuat bagi pentingnya penelitian ini dilakukan, yaitu untuk merumuskan model integratif lembaga keuangan sosial Islam yang mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat pesisir serta mengoptimalkan potensi yang ada.

Bertolak dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan pada masyarakat pesisir merupakan fenomena yang bersifat kompleks, sistemik, dan multidimensional, sehingga tidak dapat ditangani melalui pendekatan tunggal yang bersifat parsial. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan pesisir merupakan hasil interaksi berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang saling terkait. Apriyanti et al.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

(2025) menegaskan bahwa kemiskinan masyarakat pesisir tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi, tetapi juga oleh lemahnya modal sosial dan kelembagaan. Selanjutnya, Adi et al. (2025) melihat kemiskinan nelayan sebagai fenomena struktural yang dipengaruhi oleh ketimpangan akses dan kebijakan.

Selain itu, Stanford et al. (2013) menunjukkan adanya hubungan erat antara ketergantungan terhadap sektor perikanan dengan tingkat kemiskinan di wilayah pesisir. Temuan ini diperkuat oleh Stacey et al. (2021) yang menyatakan bahwa kerentanan ekonomi masyarakat pesisir juga dipengaruhi oleh degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Dari perspektif multidimensional, Cahyadinata dan Fahrudin (2019) serta Mulyasari et al. (2019) menegaskan bahwa kemiskinan pesisir tidak dapat diukur hanya dari aspek pendapatan, tetapi juga mencakup dimensi ketahanan pangan, akses kelembagaan, dan kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut, Obie (2024) dan Syahza et al. (2025) menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif, lembaga keuangan, serta rendahnya diversifikasi mata pencaharian memperkuat jebakan kemiskinan di wilayah pesisir. Bahkan, dalam konteks gender, Susilowati dan Mafruhah (2023) menemukan bahwa faktor sosial dan kelembagaan turut memperdalam kerentanan ekonomi kelompok perempuan pesisir. Dengan demikian, kompleksitas kemiskinan masyarakat pesisir merupakan hasil interaksi dinamis antara faktor ekonomi, sosial, kelembagaan, dan keterbatasan akses terhadap berbagai sumber daya strategis. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang bersifat integratif dan mampu mengakomodasi berbagai dimensi tersebut secara simultan dan berkelanjutan.

Dalam ranah teoritik, berbagai pendekatan telah dikembangkan untuk memahami dan mengatasi kemiskinan, mulai dari paradigma pertumbuhan ekonomi (*growth-oriented approach*),

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

distribusi pendapatan (*redistribution approach*), hingga pemberdayaan masyarakat (*empowerment approach*). Pendekatan berbasis pertumbuhan menitikberatkan pada peningkatan output ekonomi sebagai strategi utama dalam menurunkan kemiskinan, dengan asumsi bahwa pertumbuhan akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui efek *trickle-down* (Sumner & Tribe, 2008).

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan. Dalam banyak kasus, manfaat pertumbuhan justru terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sehingga ketimpangan tetap terjadi dan kemiskinan tidak terselesaikan secara menyeluruh (Gray, 2010). Oleh karena itu, muncul pendekatan distribusi yang menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap sumber daya dan keadilan sosial melalui kebijakan redistributif (Deveaux, 2016).

Selanjutnya, pendekatan pemberdayaan berkembang sebagai upaya yang lebih komprehensif dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Chambers (2007) menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat miskin dalam proses pembangunan, sementara pendekatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Sen menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga keterbatasan kemampuan individu dalam mengakses peluang hidup yang layak (Knecht, 2012; Frediani et al., 2019).

Meskipun demikian, masing-masing pendekatan tersebut masih memiliki keterbatasan jika diterapkan secara parsial. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang lebih integratif yang mampu menggabungkan aspek pertumbuhan, pemerataan, dan pemberdayaan secara simultan dalam kerangka yang lebih holistik dan berkelanjutan. Efektivitas instrumen-instrumen tersebut sangat ditentukan oleh kualitas sistem pengelolaannya. Tanpa adanya

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

integrasi yang sistematis, masing-masing instrumen cenderung beroperasi secara terfragmentasi sehingga tidak mampu menghasilkan dampak yang signifikan. Hal ini sejalan dengan temuan Shabbir (2020) yang menegaskan bahwa integrasi dalam sistem keuangan sosial Islam merupakan determinan utama dalam meningkatkan efektivitas intervensi sosial ekonomi.

Sejalan dengan perkembangan kontemporer, konsep integrasi dalam keuangan sosial Islam tidak lagi terbatas pada penggabungan instrumen semata, tetapi juga mencakup integrasi dengan teknologi digital, penguatan kelembagaan, serta keterhubungan dengan sistem ekonomi yang lebih luas, khususnya dalam konteks masyarakat pesisir. Karakteristik masyarakat pesisir yang cenderung menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal (*financial exclusion*), pendapatan yang fluktuatif akibat faktor musim, serta rendahnya literasi keuangan menjadikan integrasi ini semakin relevan.

Penelitian Muhamed (2025) menunjukkan bahwa adopsi teknologi finansial (*FinTech*) dalam ekosistem keuangan sosial Islam mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperluas jangkauan layanan kepada kelompok yang sebelumnya tidak terlayani (*unbanked*), termasuk komunitas pesisir. Dalam konteks ini, pemanfaatan platform digital dapat memfasilitasi penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan wakaf secara lebih transparan dan tepat sasaran kepada nelayan dan pelaku usaha mikro pesisir.

Selain itu, pendekatan kolaboratif berbasis model *quadruple helix* sebagaimana dikemukakan oleh Musari (2023) menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam menciptakan sistem yang adaptif dan berkelanjutan. Dalam masyarakat pesisir, sinergi ini dapat diwujudkan melalui penguatan kelembagaan lokal seperti koperasi nelayan atau Baitul Maal, pengembangan literasi keuangan berbasis komunitas, serta integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

lokal kelautan dan perikanan.

Dalam konteks masyarakat pesisir, urgensi pendekatan integratif menjadi semakin kuat mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Masyarakat pesisir tidak hanya membutuhkan akses terhadap pembiayaan, tetapi juga memerlukan pendampingan berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta akses terhadap pasar dan teknologi. Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan saat ini masih bersifat sektoral dan belum mampu mengintegrasikan berbagai dimensi tersebut secara efektif. Program-program pengentasan kemiskinan masih berjalan secara terpisah tanpa koordinasi lintas lembaga yang memadai.

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara konstruksi teoritik dengan realitas implementatif di lapangan. Secara konseptual, integrasi sistem keuangan sosial Islam diyakini memiliki kapasitas untuk menjadi solusi strategis dalam pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, dalam praktiknya, implementasi konsep tersebut masih belum mencapai tingkat optimal. Kesenjangan ini semakin terlihat dalam konteks masyarakat pesisir di Provinsi Jawa Barat, di mana potensi sumber daya yang besar belum mampu dikonversi menjadi peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi tidak semata berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, tetapi juga dengan efektivitas sistem yang mengelola dan mendistribusikannya.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini mengambil posisi sebagai upaya konseptual sekaligus praktis untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Penelitian ini tidak hanya berorientasi pada analisis fenomena, tetapi juga pada perumusan model solusi yang bersifat aplikatif. Secara khusus, penelitian ini difokuskan pada pengembangan model integratif lembaga keuangan sosial Islam yang mampu mensinergikan berbagai instrumen dalam

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

satu sistem yang terkoordinasi.

Model integratif yang dikembangkan tidak hanya mencakup integrasi antar instrumen keuangan sosial Islam, tetapi juga melibatkan integrasi dengan aspek teknologi, penguatan kelembagaan, serta strategi pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan model yang dihasilkan mampu membentuk sistem yang holistik, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan, khususnya pada masyarakat pesisir.

Lebih lanjut, penelitian ini juga mempertimbangkan dimensi kontekstual, yaitu karakteristik spesifik masyarakat pesisir di Provinsi Jawa Barat. Pertimbangan ini penting agar model yang dihasilkan tidak hanya memiliki validitas teoritik, tetapi juga relevansi praktis dan aplikatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan pembangunan, sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang implementatif bagi para pemangku kepentingan.

Secara konseptual, dapat ditegaskan bahwa permasalahan kemiskinan pada masyarakat pesisir menuntut pendekatan yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga integratif dan kontekstual. Oleh karena itu, pengembangan model integratif lembaga keuangan sosial Islam menjadi sebuah keniscayaan dalam upaya menjawab tantangan tersebut.

Menegaskan kembali keseluruhan argumentasi, kemiskinan pada masyarakat pesisir merupakan persoalan yang bersifat sistemik dan multidimensional, yang tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi, tetapi juga oleh faktor kelembagaan, sosial, budaya, serta akses terhadap teknologi dan sumber daya. Dengan demikian, pendekatan sektoral dan parsial tidak lagi memadai dalam

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, lembaga keuangan sosial Islam memiliki potensi strategis yang sangat besar. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara konseptual maupun empiris telah terbukti mampu mendukung redistribusi kekayaan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi akibat belum optimalnya integrasi antar instrumen dalam suatu sistem yang terkoordinasi.

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara potensi normatif dan realisasi empiris. Secara teoritik, lembaga keuangan sosial Islam dipandang sebagai solusi alternatif dalam pengentasan kemiskinan, namun dalam praktiknya kontribusinya masih terbatas, khususnya dalam konteks masyarakat pesisir. Kesenjangan ini juga diperkuat oleh dominannya penelitian yang masih bersifat parsial, yang mengkaji instrumen zakat, wakaf, maupun microfinance syariah secara terpisah. Penelitian yang mengembangkan model integratif secara komprehensif, terutama dalam konteks wilayah pesisir, masih relatif terbatas. Selain itu, pendekatan kebijakan yang cenderung top-down dan kurang mempertimbangkan karakteristik lokal turut menyebabkan rendahnya efektivitas program pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks masyarakat pesisir di Jawa Barat, kompleksitas permasalahan semakin diperkuat oleh kombinasi faktor struktural dan kultural, seperti keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, rendahnya literasi keuangan, serta ketergantungan pada sistem ekonomi tradisional. Di sisi lain, perkembangan teknologi finansial membuka peluang baru dalam meningkatkan inklusi keuangan. Namun, tanpa integrasi yang memadai antara teknologi, kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat, peluang tersebut tidak akan

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

menghasilkan dampak yang optimal. Dengan demikian, kebutuhan akan model integratif yang mampu mensinergikan berbagai instrumen keuangan sosial Islam menjadi semakin mendesak. Model tersebut tidak hanya harus mampu mengoptimalkan potensi yang ada, tetapi juga harus responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat pesisir yang memiliki karakteristik khas.

Penelitian ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, dengan tujuan merumuskan model integratif lembaga keuangan sosial Islam dalam strategi pengentasan kemiskinan pada masyarakat pesisir di Provinsi Jawa Barat. Model yang dikembangkan diharapkan tidak hanya memiliki kontribusi teoritik, tetapi juga memiliki tingkat aplikabilitas yang tinggi.

Berdasarkan uraian latar belakang, kesenjangan penelitian, serta keterbatasan studi terdahulu, dapat ditegaskan bahwa kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada pengembangan model integratif lembaga keuangan sosial Islam dalam pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir di Provinsi Jawa Barat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat parsial dan sektoral, penelitian ini mengkonstruksi suatu model yang mengintegrasikan berbagai instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan pembiayaan mikro syariah ke dalam satu sistem yang terkoordinasi. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menekankan aspek pembiayaan, tetapi juga mengintegrasikan dimensi pemberdayaan ekonomi, penguatan kelembagaan lokal, serta pemanfaatan teknologi finansial (*FinTech*) dalam satu kerangka yang holistik.

Kebaruan lainnya terletak pada pendekatan kontekstual berbasis wilayah pesisir, yang mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat pesisir yang memiliki tingkat kerentanan tinggi serta struktur ekonomi yang berbeda dibandingkan wilayah non-pesisir. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

berkontribusi pada pengembangan konsep integrasi keuangan sosial Islam secara teoritik, tetapi juga menghasilkan model aplikatif yang relevan dan implementatif dalam mendukung pengentasan kemiskinan multidimensional pada masyarakat pesisir.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi riil kemiskinan dan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat pesisir di Jawa Barat yang membutuhkan intervensi lembaga keuangan sosial Islam?
2. Bagaimana peran lembaga keuangan sosial Islam dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir di Jawa Barat?
3. Faktor apa yang memengaruhi efektivitas lembaga dalam implementasi model lembaga keuangan sosial Islam pada masyarakat pesisir?
4. Bagaimana model pengelolaan lembaga keuangan sosial Islam yang efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah pesisir Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Menggali kondisi riil kemiskinan dan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat pesisir di Jawa Barat yang membutuhkan intervensi lembaga keuangan sosial Islam.
2. Menganalisis peran lembaga keuangan sosial Islam dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir di Jawa Barat .
3. Menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi model lembaga keuangan sosial Islam pada masyarakat pesisir.
4. Merekonstruksi model pengelolaan lembaga keuangan sosial Islam yang efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah pesisir Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yang signifikan dalam memperkaya wawasan akademik di bidang ekonomi sosial, khususnya dalam memahami peran lembaga keuangan sosial dalam mengatasi kemiskinan. Dengan mengeksplorasi hubungan antara pengelolaan keuangan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam kajian ekonomi keumatan. Konsep keuangan sosial yang dikaji dalam penelitian ini juga menawarkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana sistem keuangan berbasis komunitas dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat marginal.

Lebih jauh, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan teori terkait model intervensi lembaga keuangan sosial dan efektivitasnya dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat pesisir. Dengan menyajikan analisis mendalam terhadap strategi yang diterapkan oleh lembaga keuangan sosial di Jawa Barat, penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi akademisi yang tertarik dalam studi tentang inovasi pemberdayaan berbasis komunitas. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur akademik terkait strategi pengelolaan keuangan inklusif, peran institusi sosial dalam pembangunan ekonomi, serta kebijakan berbasis bukti yang dapat diterapkan untuk mengatasi kemiskinan di daerah pesisir.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam ranah ekonomi sosial, tetapi juga membuka peluang bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang keuangan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Dengan memahami pola dan dinamika intervensi lembaga keuangan sosial dalam masyarakat pesisir, penelitian ini menjadi dasar bagi studi-studi selanjutnya dalam mengembangkan konsep keuangan sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang luas bagi berbagai

pihak yang terlibat dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Lembaga keuangan sosial dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai pedoman dalam menyusun dan mengembangkan program pemberdayaan yang lebih efektif serta berkelanjutan. Dengan memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat pesisir, lembaga keuangan sosial dapat meningkatkan kapasitas operasional mereka dalam menyalurkan bantuan dan modal usaha secara lebih tepat sasaran. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana serta keberlanjutan program agar manfaat yang diberikan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

Bagi pemerintah, penelitian ini menyediakan data empiris yang dapat digunakan sebagai landasan dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif. Dengan informasi yang diperoleh dari penelitian ini, pemerintah dapat mengintegrasikan program-program lembaga keuangan sosial ke dalam agenda pembangunan daerah dan nasional. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara berbagai pihak sehingga upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dapat berjalan secara lebih optimal.

Di sisi lain, masyarakat pesisir juga mendapatkan manfaat dari penelitian ini dalam bentuk peningkatan akses terhadap program pemberdayaan ekonomi. Evaluasi terhadap efektivitas program yang telah berjalan memungkinkan masyarakat memperoleh bantuan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pemberdayaan, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga mampu mengembangkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga berperan dalam mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berbasis komunitas.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Dengan adanya temuan dari penelitian ini, sektor swasta dapat memahami peran mereka dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat pesisir melalui kerja sama yang lebih terstruktur dengan lembaga keuangan sosial dan pemerintah. Kolaborasi yang lebih erat ini dapat menciptakan dampak positif yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

E. Kerangka Pemikiran

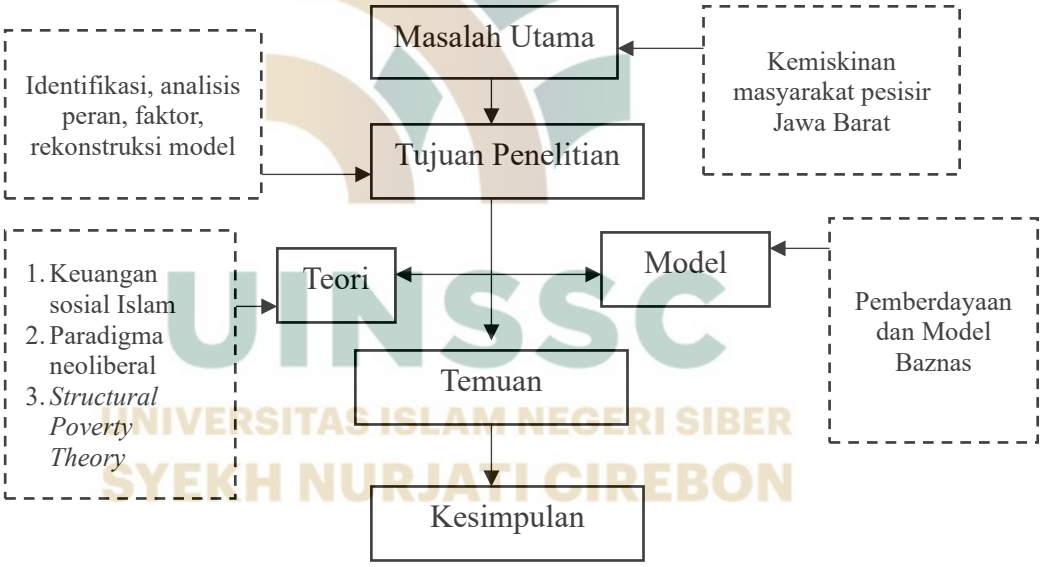
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berfokus pada permasalahan kemiskinan di wilayah pesisir Provinsi Jawa Barat, yang disebabkan oleh beberapa faktor struktural dan ekonomi. Faktor utama yang berkontribusi terhadap kondisi ini meliputi terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, rendahnya tingkat pendidikan yang berdampak pada keterbatasan keterampilan dan daya saing tenaga kerja, serta ketergantungan yang tinggi pada sektor perikanan, yang rentan terhadap fluktuasi pasar dan kondisi lingkungan. Akumulasi dari faktor-faktor tersebut memperparah ketimpangan sosial serta menurunkan kesejahteraan masyarakat, sehingga upaya intervensi yang tepat diperlukan guna mengatasi permasalahan tersebut secara berkelanjutan.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, lembaga keuangan sosial, khususnya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), memiliki peran strategis dalam menyediakan mekanisme pendanaan alternatif yang berbasis prinsip keuangan sosial Islam. Peran utama Baznas mencakup penyediaan pendanaan produktif melalui skema zakat produktif untuk mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil, pelatihan keterampilan guna meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, serta pendampingan usaha untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program pemberdayaan yang telah diimplementasikan.

Urgensi penelitian ini terletak pada evaluasi efektivitas program-program yang dijalankan oleh Baznas dalam menanggulangi kemiskinan

di wilayah pesisir. Dengan pendekatan berbasis analisis empiris, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi program keuangan sosial, serta memberikan rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan optimalisasi peran lembaga keuangan sosial dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan model intervensi yang lebih sistematis dan berbasis bukti, sehingga dapat digunakan sebagai rujukan bagi pemerintah, akademisi, serta lembaga keuangan sosial dalam menyusun kebijakan dan program yang lebih efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan sebagai berikut;



Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran

F. Literature Review

Berikut adalah deskripsi singkat terkait dengan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian tentang Penanggulangan Kemiskinan: Peran Lembaga Keuangan Sosial pada Masyarakat Pesisir di Provinsi Jawa Barat:

1. Dampak *Mikrofinansial* terhadap Pengurangan Kemiskinan

Penelitian mengenai dampak *mikrofinansial* terhadap

pengurangan kemiskinan berfokus pada efektivitas lembaga *mikrofinansial* (MFI) dalam mengurangi kemiskinan, dengan menganalisis dampak pinjaman mikro terhadap individu dan komunitas berpendapatan rendah, serta bagaimana akses terhadap pinjaman kecil dapat memberdayakan orang miskin. Studi-studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Smith (2020), menunjukkan bahwa *mikrofinansial* memiliki potensi untuk membantu mengurangi kemiskinan, khususnya di Indonesia, dengan memberikan akses modal kepada mereka yang terpinggirkan dari sistem perbankan formal.

Sementara itu, Jensen & Lee (2019) menemukan bahwa microcredit memiliki dampak positif terhadap pemberdayaan perempuan di daerah pedesaan, memberi mereka kesempatan untuk memulai usaha dan meningkatkan pendapatan. Namun, Bateman (2018) mengkritisi pendekatan *mikrofinansial* dengan menyatakan bahwa sering kali program-program ini hanya memberikan solusi sementara dan tidak mengatasi akar penyebab kemiskinan, sementara Zeller & Meyer (2019) berpendapat bahwa meskipun *mikrofinansial* telah berperan dalam pengurangan kemiskinan di Amerika Latin, efektivitasnya masih perlu dipertanyakan dalam jangka panjang.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

2. Keuangan Islam dan Pengurangan Kemiskinan

Penelitian mengenai keuangan Islam dan pengurangan kemiskinan menyelidiki bagaimana instrumen keuangan Islam seperti zakat (sumbangan amal), qard al-hasan (pinjaman tanpa bunga), dan murabaha (pembiayaan dengan harga tambah) berkontribusi pada upaya pengurangan kemiskinan di negara-negara mayoritas Muslim. Keuangan Islam, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan sosial, tidak hanya berfokus pada keuntungan semata tetapi juga pada pemerataan distribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Dalam konteks

ini, zakat memiliki peran penting sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang dapat langsung membantu mengurangi kemiskinan, sementara qard al-hasan menyediakan solusi bagi mereka yang membutuhkan tanpa membebani dengan bunga. Penelitian oleh H. Ali & Miftahurrohman (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah pada perbankan syariah dapat meningkatkan akses terhadap pembiayaan untuk kelompok ekonomi lemah di Indonesia.

Selain itu, beberapa studi menunjukkan bahwa keuangan Islam tidak hanya membantu mengurangi kemiskinan secara langsung melalui instrumen seperti zakat, tetapi juga dapat memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang lebih adil. Khan (2021) dalam penelitiannya tentang zakat dan pembangunan ekonomi di Timur Tengah menegaskan bahwa zakat memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Rashid & Alam (2020) juga menyoroti peran penting keuangan Islam dalam mengurangi kemiskinan, dengan menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah menawarkan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Kamali (2020) mengungkapkan bahwa negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia telah berhasil menggunakan keuangan Islam sebagai instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, melalui kebijakan dan produk keuangan yang lebih inklusif.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

3. Inklusi Keuangan dan Pembangunan Ekonomi

Penelitian mengenai inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi berfokus pada peran inklusi keuangan dalam mengurangi kemiskinan dan mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Inklusi keuangan mencakup akses terhadap layanan perbankan, kredit, dan produk keuangan

lainnya, yang memungkinkan individu berpendapatan rendah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Studi oleh Nguyen, (2020) di Sub-Sahara Afrika menunjukkan bahwa inklusi keuangan dapat secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan dengan meningkatkan akses terhadap kredit dan menstimulasi usaha mikro. Penelitian lain oleh Sohail & Alam (2018) menyoroti peran mobile banking dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh bank tradisional, memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat miskin.

Selain itu, Zins & Weill (2019) melakukan analisis lintas negara yang menunjukkan bahwa inklusi keuangan dapat mengurangi ketimpangan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang. Aghion & Sahay (2020) mengembangkan kerangka teoretis yang menjelaskan bagaimana inklusi keuangan mendukung pengurangan kemiskinan melalui pemberdayaan individu dan akses ke sumber daya ekonomi yang lebih baik. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan bukan hanya alat untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga elemen kunci dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

4. Dampak Sosial Lembaga Keuangan

Penelitian mengenai dampak sosial lembaga keuangan berfokus pada pengaruh lebih luas dari lembaga keuangan terhadap kemiskinan, ketimpangan, dan keadilan sosial. Penelitian ini memeriksa interaksi antara tujuan sosial dan finansial lembaga keuangan, khususnya bagaimana lembaga-lembaga ini berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan sosial. Sebagai contoh, penelitian oleh Rogers & Nguyen (2019) mengeksplorasi dampak sosial

dari kredit union di ekonomi pedesaan, menunjukkan bagaimana lembaga keuangan tersebut membantu mengurangi ketimpangan ekonomi di daerah terpencil. Penelitian lain oleh Cameron (2021) membahas peran bank dalam keadilan sosial dan pengurangan kemiskinan, dengan menyoroti pentingnya kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi bagi individu berpendapatan rendah.

Selain itu, studi oleh Jacobs & Wilkins (2021) mengkaji peran perbankan sosial dalam pengurangan kemiskinan, di mana mereka menemukan bahwa produk keuangan yang lebih inklusif dapat membantu memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat miskin. Williams & Hinojosa (2020) juga meneliti dampak dari perbankan yang bertanggung jawab secara sosial terhadap pengurangan kemiskinan, dengan menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih berorientasi pada tanggung jawab sosial dapat memberikan manfaat langsung bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan tidak hanya berfungsi untuk tujuan finansial semata, tetapi juga memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan sosial dan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat miskin.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

5. Kebijakan dan Kerangka Regulasi Lembaga Keuangan

Penelitian mengenai kebijakan dan kerangka regulasi lembaga keuangan fokus pada peran kebijakan pemerintah, regulasi, dan intervensi dalam membentuk kinerja lembaga keuangan dan bagaimana kebijakan ini memengaruhi tingkat kemiskinan di berbagai wilayah. Dalam penelitian ini, pemerintah dipandang sebagai aktor kunci yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan untuk memastikan bahwa layanan keuangan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama yang miskin. Sebagai contoh, studi oleh T. Smith &

Baker (2020) menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah yang mendukung lembaga keuangan dapat meningkatkan peran mereka dalam pengurangan kemiskinan. Selain itu, Bhagat & Kumar (2021) meneliti bagaimana regulasi perbankan di negara berkembang dapat mengurangi kemiskinan dengan menciptakan akses yang lebih luas ke kredit dan produk keuangan lainnya.

Selain itu, penelitian oleh Allen & Gale (2020) menganalisis regulasi lembaga keuangan secara global dan dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan, dengan hasil bahwa kebijakan regulasi yang tepat dapat memperkuat peran lembaga keuangan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif. Patel & Gupta (2020) lebih lanjut meneliti kebijakan regulasi di India dan dampaknya terhadap inklusi keuangan, menunjukkan bahwa regulasi yang mendukung inklusi keuangan di negara berkembang memiliki dampak positif dalam mengurangi kemiskinan. Penelitian-penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan dan regulasi yang mendukung lembaga keuangan untuk memaksimalkan peran mereka dalam pemberdayaan ekonomi dan pengurangan ketimpangan sosial.

6. Keuangan Perilaku dan Kemiskinan

Penelitian mengenai keuangan perilaku dan kemiskinan berfokus pada aspek psikologis dan perilaku dalam pengambilan keputusan keuangan oleh kelompok berpendapatan rendah. Penelitian ini mencoba memahami mengapa rumah tangga miskin sering kali menghindari layanan keuangan formal, meskipun mereka memiliki kebutuhan yang mendesak akan akses terhadap modal atau kredit. Misalnya, Feldman (2019) dalam penelitiannya mengenai faktor-faktor perilaku yang memengaruhi kemiskinan di rumah tangga pedesaan menunjukkan bahwa ketidakpercayaan terhadap lembaga keuangan dan ketakutan akan utang dapat mencegah individu miskin untuk mengakses layanan keuangan. Penelitian oleh M.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Ahmed & Rahman (2018) juga mengidentifikasi hambatan psikologis yang menghalangi inklusi keuangan, seperti rasa takut terhadap risiko finansial dan kurangnya pengetahuan mengenai produk keuangan.

Selain itu, Bastian & Jones (2020) meneliti bagaimana keuangan perilaku berperan dalam pengentasan kemiskinan, dengan menunjukkan bahwa pemahaman tentang perilaku keuangan dapat membantu lembaga keuangan untuk merancang produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan kelompok miskin. Evans & Long (2019) juga mengeksplorasi bagaimana persepsi risiko finansial di kalangan orang miskin dapat menghambat mereka dalam membuat keputusan yang lebih menguntungkan secara finansial. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menyoroti pentingnya memperhitungkan faktor psikologis dan perilaku dalam merancang kebijakan inklusi keuangan untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi kelompok berpendapatan rendah.

7. Studi Perbandingan Sistem Keuangan dalam Pengurangan Kemiskinan

Penelitian mengenai studi perbandingan sistem keuangan dalam pengurangan kemiskinan fokus pada membandingkan efektivitas berbagai sistem keuangan dalam mengatasi kemiskinan, seperti perbandingan antara sistem perbankan konvensional dan perbankan Islam, atau membandingkan skema *mikrofinansial* antar negara. Sebagai contoh, penelitian oleh Tan, Nesti, & Yonnedi (2021) membandingkan efektivitas *mikrofinansial* di India dan Bangladesh, menunjukkan bahwa meskipun kedua negara menggunakan *mikrofinansial* untuk mengurangi kemiskinan, pendekatan dan keberhasilannya sangat bergantung pada konteks lokal masing-masing. Gomez (2020) juga melakukan analisis terhadap peran berbagai sistem keuangan dalam pengurangan kemiskinan di Amerika Latin,

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

menemukan bahwa sistem keuangan yang lebih inklusif, baik konvensional maupun berbasis syariah, memiliki dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan implementasi yang diterapkan di masing-masing negara.

Selain itu, penelitian oleh Lee & McLean (2020) membandingkan sistem perbankan Islam dan konvensional dalam mengurangi kemiskinan di Timur Tengah, dengan hasil bahwa perbankan Islam memiliki keunggulan dalam menciptakan kesetaraan ekonomi melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil seperti zakat dan qard al-hasan. Hoque & Bhuiyan (2020) mengkaji perbandingan antara *mikrofinansial* dan perbankan Islam dalam pengurangan kemiskinan, menunjukkan bahwa meskipun *mikrofinansial* memberikan akses pembiayaan kepada individu miskin, perbankan Islam menawarkan alternatif yang lebih inklusif dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan yang berharga mengenai peran berbagai sistem keuangan dalam mengatasi kemiskinan, serta menunjukkan bahwa efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi, kebijakan, dan budaya lokal.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

8. Edukasi Keuangan dan Kemiskinan

Penelitian mengenai edukasi keuangan dan kemiskinan mengkaji hubungan antara literasi keuangan dan pengurangan kemiskinan, dengan fokus pada bagaimana peningkatan pemahaman tentang pengelolaan keuangan dapat membantu individu membuat keputusan ekonomi yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup mereka. Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Brown (2021), menunjukkan bahwa literasi keuangan dapat menjadi alat penting untuk mengurangi

kemiskinan di India, karena membantu masyarakat miskin untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran mereka dengan lebih efisien.

Evans (2020) juga meneliti dampak program edukasi keuangan di komunitas berpendapatan rendah, menemukan bahwa program tersebut meningkatkan kesadaran finansial dan mendorong inklusi keuangan. Selain itu, H. Smith & Patel (2020) mengungkapkan bahwa edukasi keuangan dapat mengurangi kemiskinan di Afrika dengan memberikan keterampilan yang diperlukan untuk merencanakan keuangan dan memanfaatkan layanan keuangan yang ada. Penelitian oleh Kline (2021) juga mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan dapat meningkatkan inklusi keuangan di negara-negara berpendapatan rendah, memberikan akses yang lebih besar kepada mereka yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan formal.

Penelitian ini menawarkan kebaruan baik secara konseptual, kontekstual, maupun analitis dalam kajian peran Lembaga Keuangan Sosial (LKS) Islam dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir di Provinsi Jawa Barat. Pertama, secara konseptual, penelitian ini mensintesiskan pendekatan *Islamic Social Finance* dengan teori kemiskinan struktural, teori inklusi keuangan, dan penguatan modal sosial dalam satu kerangka analisis yang terpadu. Selama ini, kajian mengenai zakat, wakaf, dan lembaga keuangan sosial lebih banyak diposisikan sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bersifat normatif dan parsial. Penelitian ini memperluas perspektif tersebut dengan memandang LKS Islam sebagai agen pemberdayaan yang mampu membangun kapasitas (*capability building*) dan memperkuat struktur sosial-ekonomi masyarakat pesisir.

Kedua, secara kontekstual, penelitian ini secara spesifik mengkaji masyarakat pesisir Jawa Barat yang memiliki karakteristik kerentanan

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

struktural, seperti ketergantungan pada sektor perikanan skala kecil, fluktuasi pendapatan musiman, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, serta rendahnya diversifikasi usaha. Kajian LKS Islam dalam konteks pesisir masih relatif terbatas, sehingga penelitian ini mengisi kekosongan empiris dalam studi ekonomi syariah berbasis wilayah pesisir.

Ketiga, secara metodologis, penelitian ini menggunakan *Analytic Network Process* (ANP) untuk menganalisis hubungan antar faktor kemiskinan dan menentukan prioritas strategi penguatan LKS Islam. Penggunaan ANP memungkinkan analisis yang lebih sistemik dan berbobot dibanding pendekatan deskriptif biasa, sehingga memberikan kontribusi dalam pengembangan metode analisis kebijakan berbasis ekonomi syariah.

Keempat, penelitian ini menghasilkan formulasi strategi penguatan peran LKS berbasis karakteristik sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang menekankan pendekatan produktif, penguatan modal sosial dan religius, serta integrasi instrumen keuangan sosial secara lebih terstruktur.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan teoretik, pendalaman konteks pesisir, penggunaan metode analitis sistemik, serta formulasi strategi penguatan LKS Islam yang berbasis temuan empiris.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

G. Sistematika Pembahasan

Disertasi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran lembaga keuangan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di masyarakat pesisir Provinsi Jawa Barat.

Bab I Pendahuluan membahas latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini, yaitu kemiskinan di wilayah pesisir yang dipengaruhi oleh keterbatasan akses keuangan, rendahnya tingkat pendidikan, serta ketergantungan terhadap sektor perikanan. Selain itu, bab ini juga menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta

manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan dari penelitian ini.

Bab II Konsep pemikiran kelembagaan keuangan sosial dan masyarakat miskin menjelaskan teori-teori yang mendukung penelitian, seperti Teori Modal Sosial, Teori Kelembagaan, Teori Keuangan Inklusif, dan Teori Perubahan Sosial, yang digunakan untuk memahami peran lembaga keuangan sosial dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu, dibahas pula konsep keuangan sosial berbasis syariah, seperti zakat produktif dan wakaf produktif, yang menjadi bagian dari solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat marginal.

Bab III Kondisi kemiskinan masyarakat pesisir jawa barat membahas kemiskinan masyarakat pesisir Jawa Barat yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, dan geografis. Ketimpangan pendapatan, pengangguran, inflasi, rendahnya pendidikan, akses kesehatan terbatas, serta keterpencilan wilayah memperburuk kesejahteraan mereka. Data statistik menunjukkan tingkat kemiskinan yang signifikan, dengan tantangan utama berupa akses terbatas ke perbankan, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya infrastruktur ekonomi dan teknologi. Solusi multidimensional diperlukan melalui kebijakan inklusif, investasi infrastruktur, peningkatan akses pendidikan, serta pemanfaatan teknologi untuk memperluas peluang ekonomi masyarakat pesisir.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan temuan utama penelitian mengenai efektivitas lembaga keuangan sosial dalam menanggulangi kemiskinan di masyarakat pesisir. Bab ini juga menganalisis pola keberhasilan serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi program keuangan sosial. Diskusi dalam bab ini berfokus pada sejauh mana program-program seperti zakat produktif, wakaf produktif, dan *mikrofinansial* syariah telah memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir.

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi merangkum temuan penelitian dan menyajikan strategi peningkatan peran lembaga keuangan sosial dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Rekomendasi ditujukan bagi pemerintah, lembaga keuangan sosial, dan masyarakat untuk

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Selain itu, bab ini mengusulkan model intervensi yang dapat diterapkan di wilayah serupa.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON